

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang bagaimana strategi *Self-Reliance* Indonesia dalam menghadapi *spillover effect* pasca perang dagang Amerika Serikat dan China 2019-2025 dengan menganalisis menggunakan teori Neo-Merkantilisme. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada periode 2019-2025 tidak lagi terbatas pada perselisihan tarif, tetapi berkembang menjadi persaingan strategis dalam bidang teknologi, investasi, rantai pasok, dan geopolitik. Kebijakan proteksionisme kedua negara menimbulkan ketidakpastian ekonomi global, mengganggu rantai pasok internasional, memperlambat perdagangan, serta mendorong terbentuknya blok-blok ekonomi baru. Dampak tersebut juga menyebar ke negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui saluran perdagangan, keuangan, investasi, dan perubahan permintaan global.

Dampak spillover ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, Indonesia mendapatkan peluang dari adanya pengalihan perdagangan, relokasi industri, dan diversifikasi pasar ekspor. Namun, di sisi lain, peluang tersebut juga membawa risiko, seperti ketergantungan pada bahan baku impor dari China, penurunan permintaan ekspor komoditas, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ketidakstabilan arus modal. Meski perekonomian Indonesia relatif tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5% pada periode 2022-2025, struktur ekonomi nasional masih cukup rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan negara-negara besar.

Pemerintah Indonesia merespons kondisi tersebut melalui strategi *Self-Reliance* yang diwujudkan dalam hilirisasi nikel dan kelapa sawit, diversifikasi produk dan tujuan ekspor, serta penguatan industri domestik, yang dilengkapi dengan *hedging* dalam diplomasi ekonomi. *Self-Reliance* di sini tidak dimaknai sebagai autarki, melainkan sebagai penguatan kapasitas domestik untuk mengelola ketergantungan eksternal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif tetapi belum optimal, dan tingkat efektivitasnya berbeda antarsektor. Pada nikel, larangan ekspor bijih sejak 2020 terlihat dari ekspor HS 2604 yang turun dari sekitar 32 juta ton pada 2019 menjadi nyaris nihil pada tahun-tahun berikutnya. Hilirisasi meningkatkan kapasitas pengolahan dan nilai tambah domestik. Namun, sektor ini masih bergantung pada modal, teknologi, dan permintaan luar negeri, terutama dari China, serta bersifat padat modal sehingga penyerapan tenaga kerjanya terbatas.

Pada kelapa sawit, penguatan kemandirian lebih nyata karena terhubung langsung dengan kebutuhan domestik melalui program biodiesel B35 hingga B50 yang menekan ketergantungan pada impor energi dan melibatkan pelaku domestik, BUMN, serta petani lokal. Meskipun demikian, volume ekspor HS 1511 relatif stagnan (28 juta ton pada 2019 dan 24 juta ton pada 2025), sementara nilainya naik dari sekitar US\$15 miliar menjadi US\$24 miliar. Sektor ini juga menghadapi tekanan regulasi seperti EUDR. Dengan demikian, efektivitas *Self-Reliance* tidak cukup diukur dari volume atau nilai ekspor semata, tetapi dari peningkatan kapasitas pengolahan, penguasaan teknologi, retensi nilai ekonomi domestik, dan berkurangnya ketergantungan pada satu pasar atau satu jenis komoditas.

Berdasarkan temuan tersebut, strategi *Self-Reliance* perlu berjalan berdampingan dengan *hedging* berbasis prinsip bebas aktif. Indonesia perlu menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, China, dan mitra lain tanpa berpihak pada salah satu pihak, memperluas kerja sama seperti CEPA, dan menggunakan proteksionisme secara selektif untuk melindungi industri strategis. Proteksionisme tersebut harus disertai peningkatan daya saing, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia agar tidak berubah menjadi kebijakan yang justru menghambat perdagangan. Secara keseluruhan, perang dagang Amerika Serikat dan China merupakan ancaman sekaligus peluang bagi Indonesia. Efektivitas strategi *Self-Reliance* pada akhirnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah *spillover effect* menjadi momentum untuk membangun kemandirian ekonomi, memperkuat keamanan ekonomi nasional, dan meningkatkan posisi Indonesia sebagai *middle power* dalam sistem ekonomi-politik internasional.

4.2 Saran

4.2.1 Saran Praktis

Secara praktis, pemerintah Indonesia perlu segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor dengan memperluas kemitraan dagang ke negara-negara nontradisional seperti India, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, sambil memanfaatkan secara optimal perjanjian dagang regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat dan China. Penguatan rantai pasok

domestik melalui pengembangan industri bahan baku lokal, pemberian insentif fiskal bagi produsen komponen strategis, dan percepatan hilirisasi sumber daya alam seperti nikel dan bauksit menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada impor dari China. Di sisi makroekonomi, penguatan cadangan devisa, koordinasi kebijakan fiskal-moneter, dan dukungan pembiayaan bagi UMKM eksportir perlu dilakukan, sementara diplomasi ekonomi proaktif harus dijalankan dengan memanfaatkan surplus dagang dengan Amerika Serikat sebagai bargaining chip dan memperkuat ASEAN centrality untuk memposisikan Indonesia sebagai middle power yang konstruktif di tengah rivalitas negara besar.

4.2.2 Saran Akademis

Secara akademis, penelitian lanjutan perlu memperluas periode analisis hingga 2027-2028 dan menambahkan studi komparatif dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam dan Thailand untuk menilai efektivitas strategi self-reliance Indonesia secara relatif, sambil mengintegrasikan teori otonomi strategis dengan neomerkantilisme untuk memperkaya kerangka analisis tentang bagaimana middle power mempertahankan ruang kebijakan di tengah rivalitas hegemon. Metodologi mixed methods yang menggabungkan data time-series dengan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan di Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bank Indonesia akan memungkinkan pengujian hubungan kausal antara perang dagang dan variabel ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga sebaiknya fokus pada evaluasi kebijakan hilirisasi, analisis

dampak kebijakan non-tarif sebagai instrumen proteksionisme modern, serta eksplorasi isu yang masih belum terjamah seperti dampak perang teknologi terhadap kapasitas inovasi Indonesia, peran digital economy bagi UMKM, dan keterkaitan self-reliance dengan sustainability dalam konteks transisi energi global.